

**PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, KOMPETISI POLITIK,
OPINI AUDIT DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
AKSESIBILITAS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Praditya Putra Perdana

Komarudin Achmad, M.Si., Ak.

Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 60 pemerintah daerah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia memiliki berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci : aksesibilitas IFR, kekayaan, kompetisi politik, opini audit, indeks pembangunan manusia.

1. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi fiskal di Indonesia atau lebih dikenal dengan sistem otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Sejalan dengan berlakunya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sebagai daerah otonom harus memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain. Daerah otonom juga harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan dana, baik yang berasal dari PAD maupun yang diterima dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (Indrarti, 2011).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif apabila informasi keuangan yang disajikan secara relevan dan dapat diakses oleh semua pihak. Oleh sebab itu cara paling efektif agar laporan keuangan dapat diakses oleh semua pihak adalah dengan melalui media-media yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Styles dan Tennyson (2007), mengatakan bahwa internet adalah media yang paling mudah dijangkau oleh

masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara *online*.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang paling murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007). Dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui media internet dapat meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang baik disamping dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Hal ini dikarenakan internet dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Selain mempublikasikan laporan keuangan melalui internet dengan di *website* resmi, pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melihat maupun mengunduh laporan keuangannya. Dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program pemerintahan serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya dengan lebih mudah.

Penelitian yang dilakukan penelitian Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005), Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013), Trisnawati (2014) serta Setyowati (2016) membuktikan bahwa kekayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR. Penelitian Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) juga lebih jauh lagi meneliti bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) serta Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IFR.

Penelitian yang dilakukan Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IFR.

Penelitian yang dilakukan Sandhani (2014) serta Setyowati (2016) membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ligoana (2016) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IFR.

Adanya keberagaman tingkat aksesibilitas IFR di *website* resmi pemerintah daerah cukup menarik untuk diteliti. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) dengan mengurangi variabel kondisi keuangan pemerintah daerah, tingkat hutang pemerintah daerah, dan visibilitas media dikarenakan beberapa penelitian menunjukkan hasil tidak berpengaruhnya variabel-variabel tersebut terhadap aksesibilitas IFR. Dengan menambahkan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas IFR, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada Pemerintah Daerah di Indonesia".

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan keuangan pemerintahan mengenai *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah daerah dengan lebih memanfaatkan *e-government* dalam bidang akuntansi yaitu *Internet Financial Reporting* (IFR) sehingga publikasi laporan keuangan dapat lebih mudah dijangkau oleh seluruh *stakeholder* pemerintah.

2. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Literatur

2.1.1 Teori Keagenan

Scott (1997:305) menyatakan bahwa hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Pemisahan pemilik dan manajemen didalam literatur akuntansi disebut dengan *agency theory* (teori keagenan). Hal ini dapat dilihat juga dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hubungan antara pimpinan pemerintahan/politikus dengan masyarakat/pemilih dapat disebut sebagai hubungan agensi (Banker dan Paxton, dalam Wau, 2015).

Pada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017), untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan pengungkapan yang memadai terkait pengelolaan keuangan pemerintah termasuk penyajian laporan keuangan. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya publikasi laporan keuangan melalui internet dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (Sinaga dan Prabowo, 2011). Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet juga dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan oleh *principal* dan *agent*. Melalui internet pemerintah dapat melaporkan informasi keuangannya kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dimana saja dan kapan saja (Wau, 2015).

2.1.2 Teori Signalling

Jika dilihat dari perspektif pemerintahan teori *signaling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agent* yang diberikan amanat oleh masyarakat selaku *principal*, berkeinginan untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Teori *signalling* dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Pemerintah daerah akan berusaha melakukan pelaporan keuangan melalui *website* secara lebih optimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, dalam Wau 2015). Dengan adanya pelaporan keuangan melalui internet masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses informasi keuangan daerahnya.

2.1.3 Kekayaan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis (Mardiasmo, 2002:238) yaitu:

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah (misalnya: candi dan bangunan bersejarah).
2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang diadani dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Menurut Setyowati (2016), besarnya kekayaan yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar akan dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi merupakan cara yang paling efektif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat dengan biaya ringan.

2.1.4 Kompetisi Politik

Salah satu perubahan yang cukup mendasar pasca reformasi adalah persaingan politik yang semakin tinggi di Indonesia. Menurut Firmanzah (2010:33), konsep persaingan politik merupakan dapat memenangkan kompetisi pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dimana partai politik perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktifitas yang dilakukan partai lain layaknya prinsip 'zero sum' setiap kemenangan dari satu pemain merupakan kekalahan dari pihak lain. Pemerintah yang berkuasa biasanya akan cenderung mengabaikan janji-janji politiknya pada masa kampanye. Hal ini akan menjadi perhatian lawan politiknya yang akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengawasi pemenuhan janji politik pemerintah.

Hal yang paling penting dalam sistem demokrasi yang ideal adalah sejauh mana kontestan dapat 'merebut hati' rakyat melalui program kerja yang ditawarkan. Masyarakat berada dalam posisi yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Dengan demikian, kemenangan kontestan merupakan fungsi dari kedekatan dan keberpihakan pada permasalahan bangsa dan negara. Masing-masing kontestan berusaha menjadi yang terbaik di mata rakyat. Kenyataan ini semakin meningkatkan udara persaingan yang ada di antara para kontestan yang terlibat dalam pemilu.

Menurut Trisnawati (2014), tingkat kompetisi politik yang tinggi dalam suatu pemerintah daerah akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar dari para saingan politik dan masyarakat. Para saingan politik akan selalu berusaha mengawasi kinerja pemerintah daerah yang sedang menjabat terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar. Untuk mengurangi biaya pengawasan yang lebih besar tersebut pemerintah daerah akan berusaha memilih media yang paling murah dan efektif untuk menyebarkan informasi, salah satunya informasi laporan keuangan. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi pemerintah daerah dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk memfasilitasi pengawasan oleh para saingan politiknya.

2.1.5 Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110 paragraf 01 (SPAP, 2011), tujuan auditor atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Menurut Aikin (dalam Badara dan Saidin, 2012), pemerintah memiliki opini audit yang baik akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan kepada publik, khususnya dengan memanfaatkan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini disebabkan pemerintah daerah yang menerima opini yang wajar tanpa pengecualian (WTP) akan menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangannya (Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana, 2017).

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Keteraksesan informasi mengenai indeks pembangunan manusia di internet menjadi hal penting, karena dibutuhkan secara sukarela oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan *Internet Financial Reporting* (IFR). Sumber daya manusia dari suatu bangsa, tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro, 1999:61). Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami *diminishing return* tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan (Kuncoro, 1997:73).

Menurut Hanifah, Suryarini, dan Mukibad (2017), tingkat pembangunan manusia yang tinggi disuatu daerah akan mengakibatkan masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki peran pada pemerintah daerah sehingga akan menuntut agar pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi khususnya laporan keuangan membuktikan adanya pemenuhan kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu cara yang paling mudah dan murah untuk memberikan kemudahan akses laporan keuangan kepada masyarakat ialah dengan melakukan IFR di *website* resmi pemerintah daerah.

2.1.7 Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan perkembangan dari pengungkapan informasi yang sudah ada. Melalui IFR di *website* resmi pemerintah daerah, informasi laporan keuangan akan tersampaikan dengan tepat waktu (Rahman, Sutaryo, dan Budiartanto, 2013). Semakin tepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Selain itu menurut *Government Financial Officer's Association* (GFOA) penggunaan *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap dokumen-dokumen laporan keuangan dan anggaran. Pemerintah akan menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan anggaran karena akses yang terbuka memungkinkan semua pihak dapat mengaksesnya.

2. Dapat memberikan kemudahan dalam melakukan analisis. Informasi laporan keuangan dan anggaran dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
3. Menghemat biaya publikasi karena internet dapat luas menjangkau.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memonitor kinerja keuangan pemerintah dengan mudah melalui laporan keuangan yang tersedia di internet.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemerintah daerah yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan (Trisnawati, 2014). Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah melakukan transparansi informasi keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi untuk memenuhi tuntutan transparansi masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi keuangan dengan biaya yang murah dan efektif ialah dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi pemerintah daerah.

Hasil penelitian Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005), Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013), Setyowati (2016) serta Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) serta Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.2.2 Kompetisi Politik

Kompetisi politik yang tinggi disuatu pemerintah daerah akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar dari para saingan politik dan masyarakat. Saingan politik yang berkuasa akan selalu kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kompetisi politik yang tinggi akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi dengan memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji mereka sebelum pemilu (Baber, dalam Laswad, Fisher, dan Oyelere, 2005). Pemerintah daerah akan memilih media yang paling efektif dan efisien yang digunakan untuk memberikan transparansi informasi keuangan, salah satunya melalui IFR. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi keuangan dari saingan politik dan masyarakat.

Pemerintah daerah yang memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi berarti juga telah menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Informasi keuangan yang baik akan membawa penilaian yang baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang berkuasa akan memiliki peluang terpilih kembali di periode berikutnya.

Hasil penelitian Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) serta Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013) menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) serta Hanifah, Suryarini, dan Mukibad (2017) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.2.3 Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP akan cenderung memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi untuk menunjukkan sinyal positif terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendapatkan opini audit selain WTP akan menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung menutupi informasi keuangannya (Tisnawati, 2014).

Hasil penelitian Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Opini Audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Semakin tinggi indeks pembangunan manusia di suatu daerah, maka kualitas sumber daya manusia juga akan semakin baik, sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan anggaran daerah juga akan semakin meningkat (Hanifah, Suryarini, dan Mukibad, 2017). Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat semakin menyadari bahwa peran mereka sangat penting dalam pemerintahan sehingga akan menuntut transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini akan mengakibatkan pemerintah daerah akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan transparansi masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat.

Hasil penelitian Sandhani (2014), Setyowati (2016) serta Hanifah, Suryarini, dan Mukibad (2017) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ligoana (2016) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa, (2) Memiliki *website* resmi dan dapat diakses, (3) Memiliki menu transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, (4) Memiliki menu transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, (5) Memiliki data kekayaan yaitu total aset, (6) Memiliki data kompetisi politik berupa jumlah kandidat

kepala daerah pemilukada terakhir, (7) Memiliki data opini audit atas LKPD, (8) Memiliki data indeks pembangunan manusia.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa alamat *website* resmi pemerintah daerah, data opini audit atas LKPD diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, data total aset pemerintah daerah, data jumlah kandidat calon kepala daerah pemilukada terakhir, dan data nilai indeks pembangunan manusia di daerah.

Data variabel dependen, yaitu tingkat aksesibilitas IFR oleh pemerintah daerah diperoleh dengan mengamati langsung pada *website* resmi pemerintah daerah. Alamat *website* resmi pemerintah daerah didapat dari *website* resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data variabel independen kekayaan pemerintah daerah yaitu total aset didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Untuk data opini audit diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk data non keuangan, seperti data untuk variabel kompetisi politik yaitu jumlah kandidat calon kepala daerah diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data berupa nilai indeks pembangunan manusia di daerah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia. Aksesibilitas IFR diukur dengan memberikan skor berdasarkan syarat yang ada pada *Calculation of Accessibility Index Value* dapat dilihat pada Tabel 1.

Kekayaan pemerintah daerah diukur berdasarkan total aset dimiliki pemerintah daerah yang tercantum dalam neraca. Kompetisi politik diukur berdasarkan jumlah kandidat calon kepala daerah pada pemilukada terakhir yang dilaksanakan di daerah. Opini audit diukur berdasarkan variabel *dummy*, yaitu jika pemerintah daerah menerima opini WTP maka diberi nilai 1 (satu), sedangkan pemerintah daerah yang menerima opini selain WTP diberi nilai 0 (nol). Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia di daerah.

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, model regresi linear berganda yang digunakan ialah :

$$\text{IFRACCESS} = \alpha + \beta_1\text{WEALTH} + \beta_2\text{POLCOMP} + \beta_3\text{OPINION} + \beta_4\text{DEVELOP} + \mu_i$$

Dimana :

IFRACCESS = Aksesibilitas *Internet Financial Reporting*

α = Konstanta

WEALTH = Kekayaan Pemerintah Daerah

POLCOMP = Kompetisi Politik

OPINION = Variabel *dummy* jenis opini audit (kode 1 untuk opini WTP dan untuk opini selain WTP)

DEVELOP = Indeks Pembangunan Manusia

μ_i = *Error*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang dijelaskan, maka sampel penelitian ini adalah sebanyak 60 pemerintah daerah kabupaten/kota. Ringkasan perhitungan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pemerintah daerah yang dijadikan sampel penelitian ini sebesar 7.03, dengan nilai tertinggi atau sempurna sebesar 10 yang diperoleh 4 pemerintah daerah. Sementara itu terdapat 20 pemerintah daerah (33%) yang mendapatkan nilai aksesibilitas IFR yang paling rendah dibawah rata-rata.

Variabel kekayaan pemerintah daerah (WEALTH) yang diukur berdasarkan total aset dimiliki pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 1.757.396.551.761,76 dan nilai maksimum sebesar Rp 38.689.329.720.727,6. Pemerintah daerah dengan kekayaan terendah adalah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan tertinggi adalah Kota Surabaya. Nilai rata-rata kekayaan pemerintah daerah yang diteliti adalah Rp 20.223.363.136.245.

Variabel kompetisi politik (*POLCOMP*) diukur berdasarkan jumlah kandidat calon kepala daerah pada pemilukada terakhir memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 8. Kompetisi politik terendah berada di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kompetisi politik tertinggi berada di Kota Bandung dan Kabupaten Sumenep. Rata-rata kompetisi politik pemerintah daerah yang diteliti adalah sebesar 4,26.

Tabel 4 menunjukkan frekuensi opini audit atas LKPD yang diukur dengan variabel *dummy*. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 88,3% sampel pemerintah daerah yang diteliti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini WTP adalah 53 pemerintah daerah. Sementara itu, sisanya sebanyak 7 pemerintah daerah atau 11,7% mendapat opini audit Non WTP.

Variabel indeks pembangunan manusia (*DEVELOP*) diukur berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia di daerah memiliki nilai minimum sebesar 62,30 dan nilai maksimum sebesar 85,32. indeks pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Bangkalan. Indeks pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta. Rata-rata indeks pembangunan manusia pemerintah daerah yang diteliti adalah sebesar 73,81.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas residual menggunakan grafik *Normal P-P Plot* terhadap model regresi linier antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* diperoleh titik-titik plot berhimpit dengan garis diagonal sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas residual menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap model regresi linier antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,000 ($p > 0,05$) sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* menggunakan uji VIF diperoleh nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10 sehingga tidak ditemukan masalah multikolinieritas.

4.1.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* menggunakan grafik *Scatterplot* diketahui titik-titik plot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.1.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan uji asumsi autokorelasi dengan uji *durbin watson* terhadap model regresi antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* diperoleh nilai DW di dalam rentang nilai dU dan nilai 4-dU sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 8 hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* terhadap *IFRACCESS* disajikan sebagai berikut :

$$\text{IFRACCESS} = \alpha + \beta_1\text{WEALTH} + \beta_2\text{POLCOMP} + \beta_3\text{OPINION} + \beta_4\text{DEVELOP} + \mu_i$$

$$\text{IFRACCESS} = -12,243 + 0,500 \text{ WEALTH} + 0,157 \text{ POLCOMP} + 0,921 \text{ OPINION} + 0,044 \text{ DEVELOP} + \mu_i$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar -12,243 menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* maka nilai *IFRACCESS* adalah -12,243.
2. Nilai koefisien *WEALTH* sebesar 0,500 menunjukkan setiap peningkatan nilai *WEALTH* sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai *IFRACCESS* sebesar 0,500 atau semakin baik *WEALTH* maka semakin baik *IFRACCESS*.
3. Nilai koefisien *POLCOMP* sebesar 0,157 menunjukkan setiap peningkatan nilai *POLCOMP* sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai *IFRACCESS* sebesar 0,157 atau semakin baik *POLCOMP* maka semakin baik *IFRACCESS*.
4. Nilai koefisien *OPINION* sebesar 0,921 menunjukkan setiap peningkatan nilai *OPINION* sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai *IFRACCESS* sebesar 0,921 atau semakin baik *OPINION* maka semakin baik *IFRACCESS*.
5. Nilai koefisien *DEVELOP* sebesar 0,044 menunjukkan setiap peningkatan nilai *DEVELOP* sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai *IFRACCESS* sebesar 0,044 atau semakin baik *DEVELOP* maka semakin baik *IFRACCESS*.

4.1.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa hasil koefisien determinasi didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,721 artinya bahwa besar pengaruh terhadap *IFRACCESS* yang ditimbulkan oleh variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* adalah sebesar 72,1 persen, sedangkan besar pengaruh terhadap *IFRACCESS* yang ditimbulkan oleh faktor lain adalah sebesar 27,9 persen.

4.1.3.3 Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 10 didapat nilai F hitung (39,133) lebih dari F tabel (2,540) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak (*fit*). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel *WEALTH*, *POLCOMP*, *OPINION*, dan *DEVELOP* berpengaruh terhadap *IFRACCESS*.

4.1.3.4 Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 11, pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji parsial antara variabel *WEALTH* terhadap variabel *IFRACCESS* didapatkan nilai t hitung (2,352) lebih dari t tabel (2,004) atau nilai signifikansi (0,022) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel *WEALTH* terhadap variabel *IFRACCESS*.
2. Uji parsial antara variabel *POLCOMP* terhadap variabel *IFRACCESS* didapatkan nilai t hitung (2,017) lebih dari t tabel (2,004) atau nilai signifikansi (0,049) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel *POLCOMP* terhadap variabel *IFRACCESS*.
3. Uji parsial antara variabel *OPINION* terhadap variabel *IFRACCESS* didapatkan nilai t hitung (3,765) lebih dari t tabel (2,004) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel *OPINION* terhadap variabel *IFRACCESS*.
4. Uji parsial antara variabel *DEVELOP* terhadap variabel *IFRACCESS* didapatkan nilai t hitung (2,800) lebih dari t tabel (2,004) atau nilai signifikansi (0,007) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel *DEVELOP* terhadap variabel *IFRACCESS*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kekayaan Pemerintah Daerah

Menurut Setyowati (2016), besarnya kekayaan yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai dan ikut mengawasi bagaimana kekayaan tersebut dikelola (Afryansyah dan Haryanto, 2013). Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan pemerintah daerah, maka semakin tinggi pemantauan oleh masyarakat dan semakin tinggi pula permintaan informasi yang disediakan pada *website* untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

Kekayaan pemerintah daerah yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah selaku *agent* dan masyarakat selaku *principal* (Trisnawati, 2014). Pemerintah daerah dapat bertindak hanya mementingkan kepentingan mereka saja, tanpa mepedulikan kepentingan masyarakat yang nantinya akan terjadi *agency problem*. Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah melakukan transparansi informasi keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi untuk memenuhi tuntutan transparansi masyarakat.

Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah juga dapat menunjukkan sinyal positif kepada para investor bahwa daerahnya merupakan daerah yang kaya. Hal ini dimaksudkan agar para investor tertarik untuk melakukan

investasi di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005), Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013), Setyowati (2016) serta Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) serta Afriansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

4.2.2 Kompetisi Politik

Tingkat kompetisi politik yang tinggi dalam suatu pemerintah daerah akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar dari para saingan politik dan masyarakat. Para saingan politik akan selalu berusaha mengawasi kinerja pemerintah daerah yang sedang menjabat terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar. Untuk mengurangi *monitoring cost* yang lebih besar tersebut pemerintah daerah akan berusaha memilih media yang paling murah dan efektif untuk menyebarkan informasi, salah satunya informasi laporan keuangan. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi pemerintah daerah dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk memfasilitasi pengawasan oleh para saingan politiknya.

Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah dapat menunjukkan hasil kinerja mereka kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat bahwa mereka telah melaksanakan kinerja pemerintahan daerahnya dengan baik, jujur, dan transparan. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat yang berkuasa akan meningkatkan elektabilitasnya dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) serta Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persaingan politik dalam pemerintah daerah dalam pemerintah daerah, maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas IFR di *website* resminya. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Prabowo (2011), Afriansyah dan Haryanto (2013), Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) serta Hanifah, Suryarini, dan Mukibad (2017) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

4.2.3 Opini Audit

Styles dan Tennyson (2007), menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik, cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya di internet. Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Pemerintah daerah tentu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan opini WTP tersebut, sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Trisnawati, 2014). Dari hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 60 pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebanyak 88,3% pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Hal inilah yang memotivasi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses IFR dalam *website* resminya. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi merupakan cara yang paling

efektif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat dan mengurangi biaya pelaporan yang tinggi.

Pengaruh opini audit terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) ini juga didukung dengan hasil penelitian Khasanah, Boediono, dan Yuhertiana (2017) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Setyowati (2016), menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki indeks pembangunan yang baik akan cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang baik pula. Semakin baik pertumbuhan indeks pembangunan manusia disuatu daerah maka semakin baik pula kualitas kehidupan masyarakat sehingga semakin baik pemerintahan yang dihasilkan (Ramachandran, dalam Hanifah, Suryarini, dan Mukibad, 2017). Pengelolaan pemerintahan daerah yang baik mensyaratkan adanya keberadaan masyarakat yang tingkat pembangunannya baik pula. Indeks pembangunan manusia di suatu daerah, sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, dimana kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat semakin menyadari bahwa peran mereka sangat penting dalam pemerintahan, sehingga akan menuntut transparansi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu keinginan masyarakat untuk memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan anggaran daerah juga akan semakin meningkat (Hanifah, Suryarini, dan Mukibad, 2017). Hal ini akan mengakibatkan pemerintah daerah akan menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan transparansi masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat.

Hasil penelitian Sandhani (2014), Setyowati (2016) serta Hanifah, Suryarini, dan Mukibad (2017) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ligoana (2016) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 60 sampel pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) belum sepenuhnya maksimal. Nilai rata-rata indeks aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pemerintah daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebesar 7.03, dari nilai maksimal sebesar 10.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia terbukti mempengaruhi tingkat aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Indonesia. Semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah, maka semakin tinggi pengawasan dan tuntutan transparansi dari masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resminya. Kompetisi politik yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resminya untuk

mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh saingan politiknya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP cenderung akan memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resminya kepada masyarakat, sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Indeks pembangunan manusia yang tinggi di suatu daerah akan mengakibatkan masyarakat semakin menyadari bahwa peran mereka sangat penting dalam pemerintahan dan mempunyai keinginan untuk memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resminya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan pemerintah daerah selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat selaku *principal*, salah satunya dengan memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resmi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori *signaling* yang menyatakan pemerintah daerah selaku *agent* diberikan amanat oleh masyarakat selaku *principal* berkeinginan untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan kemudahan akses *Internet Financial Reporting* (IFR) di *website* resmi.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yang pertama adalah variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* tanpa memperhatikan jenis-jenis opini audit yang diperoleh pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterbatasan penelitian ini yang pertama adalah kemampuan menjelaskan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pemerintah daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pemerintah daerah di Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan skala poin untuk mengukur variabel opini audit dengan memperhatikan penilaian terhadap jenis opini audit BPK yang diperoleh pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), seperti jumlah pengguna internet masing-masing daerah, luas wilayah pemerintah daerah, tingkat pendidikan masyarakat, jumlah pengguna internet, dan tipe pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afransyah, R. D. & Haryanto. (2013). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, (3) 2, 1-11. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id>
- Astuti, I. R. dan Darsono. (2012). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non. Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, vol. 1 No.2:1-10. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/36164/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017*. Diakses dari www.bpk.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/>

- Badara, S. dan Saidin, S. Z. (2012). *The Status of Internal Audit at Local Government Level in Nigeria*. *Journal of Business and Management*, Vol. 5 (5): 37-41. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/272692952_Internal_Audit_Effectiveness_Data_Screening_and_Preliminary_Analysis
- Brata A.G. (2002). *Pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional di Indonesia*. *Jurnal ekonomi pembangunan*, Kajian ekonomi Negara berkembang.1:13-122. Diakses dari <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/645/0>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Neraca 2017*. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, F. F., Suryarini, T., & Mukibad, H. (2017). Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, Dan *Leverage* Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Universitas Jember*, Jember 27-30 September 2017, 1-23. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/3460/3390>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. (2011). Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Riau*. Diakses dari <https://www.scribd.com/doc/168296654/>
- Jogiyanto. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & Boediono, G. S. (2017). Determinan Aksesibilitas *Internet Financial (IFR)* Pemerintah Ibu Kota Propinsi di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Universitas Jember*, Jember 27-30 September 2017, 1-20. Diakses dari <http://eprints.binadarma.ac.id/3513/1/Artikel%20SNA%202015%20Verawaty.pdf>
- Laswad, Fawzi., Fisher, Richard., & Oyelere, Peter. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 (2005), 101-121. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>
- Liqoana, M. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Pengungkapan Sukarela dalam *Website* Pemda Di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/54671>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Mulyadi. (2002). *Auditing, Edisi keenam, Cetakan pertama*. Jakarta: Salemba.

- Rahman, A., Sutaryo, dan Budiartanto, A. (2013). *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 1(26), 1299-1323. Diakses dari <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/SUTARYO-SNA-16-ARTIKEL-3.pdf>
- Sandhani, N. A. (2014). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat pengungkapan Informasi Secara Sukarela dalam *Website* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/42617>
- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory, International Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 45-62. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/download/3120/2443>
- Sinaga dan Prabowo. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/28576/>
- Styles, A. K. & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19 (1), 56-92. Diakses dari <https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>
- Todaro, M. P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Bogor: Penerbit Ghalia.
- Trisnawati, M. D. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari http://jdih.bphn.go.id/file_peraturan/15uu009.pdf
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_22.pdf
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang. Keterbukaan Informasi Publik. Diakses dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-14-tahun-2008.html>
- United Nations Development Programme. (2015). *September 2015 Indeks Pembangunan Manusia*. Dakses dari <http://www.id.undp.org>
- Wau, I. (2015). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/46929/1/01_WAU.pdf

LAMPIRAN

Tabel 1

Indeks Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR)

Skor	Syarat
+1	Jika <i>website</i> Resmi pemerintah daerah dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian <i>google</i> atau <i>yahoo</i> dengan mengetik nama pemerintah daerah.
+1	Jika terdapat link data informasi keuangan seperti LKPD atau APBD pada halaman depan/beranda/ <i>home website</i> .
+1	Jika terdapat <i>search engine</i> untuk melakukan pencarian informasi keuangan.
+1	Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>website</i> pemerintah daerah.
+1	Jika data <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dapat diunduh dalam format <i>PDF</i> atau <i>HTML</i> .
+1	Jika ukuran file laporan keuangan yang dapat diunduh kurang dari 3MB.
+1	Jika terdapat data <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) tahun sebelumnya dalam <i>website</i> pemerintah daerah.
+2	Jika terdapat komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lengkap seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LAK, CALK, dan APBD.
+1	Jika terdapat informasi <i>contact person</i> seperti telpon/ <i>fax</i> / <i>email</i> untuk mendapatkan data informasi keuangan.
	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalkulasi nilai indeks berdasarkan hasil pencarian IFR sesuai tanggal akses <i>website</i> Pemerintah daerah dilakukan. - <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam hal ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK seperti : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2015-2016). - Data <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) tahun sebelumnya yang dimaksud ialah tahun anggaran 2015 - Jika memenuhi syarat ditambahkan sesuai skor, jika tidak memenuhi = 0

Tabel 2

Ringkasan Perhitungan Sampel

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2016	514
Dikurangi :	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Pulau Jawa	395
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki <i>website</i> resmi atau tidak dapat diakses	7
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki menu transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dalam <i>website</i> resminya	40

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak menyediakan LKPD di <i>website</i> resmi	11
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data total aset	1
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data jumlah kandidat kepala daerah	0
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data opini audit	0
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data indeks pembangunan manusia	0
Total Sampel	60

Tabel 3

Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>IFRACCESS</i>	60	4.00	10.00	7.0333	1.51788
<i>WEALTH</i>	60	1.75	38.68	20.2233	.77299
<i>POLCOMP</i>	60	1.00	8.00	4.2667	1.95601
<i>OPINION</i>	60	.00	1.00	.5667	.49972
<i>DEVELOP</i>	60	62.30	85.32	73.8100	10.08388
<i>Valid N (listwise)</i>	60				

Tabel 4

Opini Audit LKPD

Opini LKPD	Jumlah	Persentase
Non WTP	7	11,7
WTP	53	88,3
Total	60	100

Tabel 5

Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		60
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.77398169
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.046
	<i>Positive</i>	.040
	<i>Negative</i>	-.046

<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	.353
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	1.000

Tabel 6

Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>WEALTH</i>	.403	2.480
	<i>POLCOMP</i>	.473	2.116
	<i>OPINION</i>	.730	1.371
	<i>DEVELOP</i>	.435	2.299

Tabel 7

Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	dU	4-dU
1,763	1,727	2,273

Tabel 8

Uji Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	<i>(Constant)</i>	-12.243	5.615	
	<i>WEALTH</i>	.500	.213	.255
	<i>POLCOMP</i>	.157	.078	.202
	<i>OPINION</i>	.921	.245	.303
	<i>DEVELOP</i>	.044	.016	.292

Tabel 9

Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.860 ^a	.740	.721	.80163

Tabel 10

Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	100.590	4	25.147	39.133	.000 ^b
	<i>Residual</i>	35.344	55	.643		
	<i>Total</i>	135.933	59			

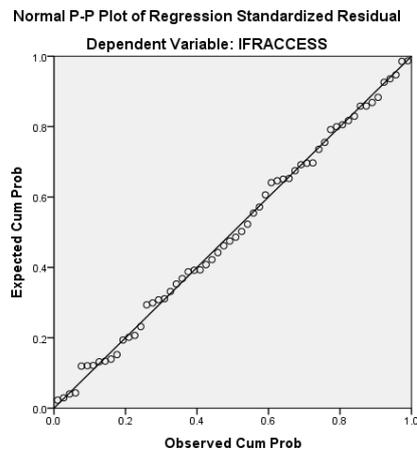
Tabel 11

Uji t

<i>Model</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Ket.</i>
1	(Constant)	-2.180	.034	
	<i>WEALTH</i>	2.352	.022	H ₁ Diterima
	<i>POLCOMP</i>	2.017	.049	H ₂ Diterima
	<i>OPINION</i>	3.765	.000	H ₃ Diterima
	<i>DEVELOP</i>	2.800	.007	H ₄ Diterima

Gambar 1

Uji Normalitas Normal P-P Plot



Gambar 2

